

Gejolak di Awal Gerak: Perwari dalam Kemelut Revolusi Indonesia

GALUH AMBAR SASI

Universitas Kristen Satya Wacana
Email: ardhanawari@gmail.com

Abstract

The historical narrative of the Indonesian women's movement is solely about the congressional activities and their results without giving explanation on the meaning and historical context of the movement. This can be seen from the discourse of Indonesian women's movement during the revolutionary period, which generally centered on four main points, i.e. women's mobilization in the Red Cross, women paramilitary troops, public kitchen, as well as organizational change and its congress. As an alternative, in this article I examine the first five months of Perwari (the Women Association of Republic Indonesia), its dynamic and historical context. The research finds out that differences of ideologies, perceptions, and expectations about the Indonesian revolution influenced the direction of women's movement, triggering internal conflict that eventually destroyed them.

Keywords:

Indonesian
revolutionary;
perwari;
women
movement;
women state

Abstrak

Narasi sejarah gerakan perempuan Indonesia seringkali terfokus pada kegiatan kongres dan hasil-hasilnya tanpa menjelaskan makna dan semangat zaman yang menggerakkan arah dan dinamika mereka. Hal ini terutama terlihat jelas pada gerakan perempuan Indonesia di masa revolusi yang terpusat pada mobilisasi perempuan dalam Palang Merah, kelaskaran, dapur umum, serta beragam kongres organisasi. Sehubungan dengan itu, tulisan ini menawarkan narasi alternatif dengan mengkaji "kehidupan" lima bulan pertama Perwari (Persatoean Wanita Repoeblik Indonesia) serta jiwa zaman yang melatarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan ideologi, persepsi, dan harapan tentang revolusi mempengaruhi orientasi dan arah gerakan perempuan, dan bahkan menimbulkan gejolak yang memecah dan menghancurkan mereka.

Kata kunci:

gerakan
perempuan;
ibu negara;
Revolusi
Indonesia;
perwari

Pengantar

Walaupun mengalami perkembangan, posisi historis perempuan masih belum menjadi narasi dan interpretasi utama dalam historiografi Indonesia (Dobbin 1979: 44-51; Kuntowijoyo 2005: 114-115; Purwanto 2006: 29-31; Sasi 2017: 177; Taylor 1995: 13). Hal ini bisa dilacak dari minimnya kehadiran dan bahkan ketidakhadiran perempuan dalam historiografi tentang peristiwa-peristiwa besar sejarah Indonesia sebagai subjek otonom. Padahal, ada banyak aspek sejarah perempuan yang bisa ditulis di antaranya eksistensi perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, keagamaan, bahkan kuliner maupun biografi atau prosopografi perempuan, gerakan perempuan, hubungan laki-laki dan perempuan, kelompok-kelompok perempuan, etnisitas, terbitan perempuan, perang, diplomasi, maupun pembentukan negara (Fatimah 2008: 377, 390; Kuntowijoyo 2003: 125-127; Purwanto 2006: 30-34).

Sementara itu, dalam konteks historiografi perempuan Indonesia yang terus berkembang, sejarah gerakan perempuan muncul sebagai tema penelitian yang cukup dominan. Kuntowijoyo (2003: 122) bahkan berpendapat bahwa sejarah perempuan Indonesia kerap kali diartikan sebagai sejarah gerakan perempuan. Hal itu terjadi karena adanya anggapan bahwa gerakan perempuan adalah wujud paling konkret dari narasi dan perjuangan perempuan untuk keluar dari ranah domestik mereka menuju eksistensi barunya di ranah publik (Triwibowo 2006: 28). Selain itu, gerakan perempuan memiliki visi dan misi yang selalu berubah coraknya, menyesuaikan dengan waktu dan tempat (Suryochondro 1984: 67). Persoalannya, narasi sejarah gerakan perempuan Indonesia relatif terjebak pada deskripsi kegiatan kongres organisasi perempuan dan hasil-hasilnya tanpa menganalisis makna apalagi semangat zaman yang menggerakkan, juga pengaruh suatu peristiwa tertentu dalam suatu periode terhadap perubahan arah dan dinamika gerak mereka (Department of Information Republic of Indonesia 1968; Fatimah 2008: 390; Soewondo & Soerasno 1995: 135-141; Stuers 2008: 175, 196; Trimurti 1995).

Persoalan itu terutama terlihat jelas pada gerakan perempuan Indonesia pada masa revolusi. Selain keterbatasan sumber penulisan¹, generalisasi revolusi sebagai periode tunggal tanpa pernah memperhitungkan dinamika yang terjadi dalam empat tahun krusial tersebut menyebabkan narasinya relatif hanya berkaitan dengan pembubaran organisasi perempuan bentukan Jepang, pembentukan organisasi baru, serta mobilisasi perempuan baik di front depan dan belakang melalui kegiatan kelaskaran, Palang Merah, dapur umum, serta pengumpulan dana perang (Darwin 2004: 286; Sasi 2017: 177; Soekarno 1984: 190; Soewito 1992; Stuers 2008: 175-196; Wieringa 1998:

1) Hal ini sebagaimana juga diungkapkan Harry A. Poeze dalam sebuah perbincangan informal di kantor Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 4 November 2019.

14). Sementara itu, narasi tentang kongres sebagai roh dan ekspresi gerakan juga bisa dipastikan senantiasa berkaitan dengan pelaksanaan dan butir-butir hasil kongres-kongres di lima kota yang berbeda pada masa itu (Department of Information Republic of Indonesia 1968; Sasi 2010; Soewondo & Soerasno 1995: 135-141; Stuers 2008: 175, 196).²

Kritik dan perspektif baru penulisan sejarah perempuan periode revolusi Indonesia sebenarnya tidak kurang. Purwanto (2006: 34), misalnya, berpendapat bahwa historiografi Indonesia lebih terpaku pada perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan daripada proses sosialisasi keluarga atau kehidupan sosial perempuan pada masa revolusi. Sementara itu, Poeze (2009: 14, 21, 27, 29, 361-362) juga telah memberikan perspektif berbeda tentang gerakan perempuan periode itu dengan mengulas afiliasi federasi organisasi perempuan Perwari dengan Persatoean Perdjoengan. Melalui uraian singkat dalam enam halaman, ia mengajak pembaca memahami bagaimana persepsi tentang revolusi dan ideologi mengubah gerakan sekaligus memecah organisasi perempuan. Namun, ia melihat dan menempatkannya dari kacamata sejarah Persatoean Perdjoengan sehingga tidak ada informasi jelas apa itu Perwari, alasan berafiliasi dengan Persatoean Perdjoengan, dan gejala di antara anggota-anggotanya. Kekurangan ini menambah daftar karakteristik penulisan sejarah Perwari yang rata-rata membahas tiga hal. Pertama, pembentukannya pada 17 Desember 1945 bersamaan dengan Kongres Perempuan di Klaten. Kedua, perjuangan Undang-undang Perkawinan dan protes terhadap poligami Sukarno. Ketiga, kemunduran dan pembersihan besar-besaran Perwari pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Fatmawati 2019; Nimat 2009; Rohmah 2015; Rospirawati 2013; Sasi 2010).

Berpijak dari uraian-uraian di atas, tulisan ini mencoba menyajikan fragmen yang hilang dalam sejarah Perwari dengan membahas secara detail dinamika internal di lima bulan pertamanya. Surat kabar, majalah, serta memoar menjadi referensi utama untuk menjawab dua pertanyaan berikut: *Pertama*, apa makna proklamasi kemerdekaan bagi aktivis perempuan? *Kedua*, apakah koalisi Perwari dalam Persatoean Perdjoengan adalah contoh bentuk penyimpangan orientasi (gerakan) perempuan terhadap revolusi Indonesia?

Wadah Perempuan Baru

Tersebarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mendorong para perempuan untuk bertransformasi dan mengekspresikan dirinya sebagai manusia baru Indonesia. Berbagai cara mereka lakukan, mulai dari menyelenggarakan pawai kemerdekaan, mengusung simbol-

2) Klaten (15-17 Desember 1945), Solo (25-26 Februari 1946 dan 26-28 Agustus 1948), Madiun (14-16 Juni 1946), Magelang (14-16 Juli 1947), serta Yogyakarta (26 Agustus-2 September 1949).

simbol ke-Indonesia-an, hingga berkeliling keluar masuk pedesaan untuk memperkenalkan negara dan semua atribut ke-Indonesia-an (Sasi 2015). Selain itu, mereka juga membentuk organisasi-organisasi baru untuk menggantikan Fujinkai yang merupakan bentukan rezim Jepang. Salah satunya adalah Perwani (Persatoean Wanita Indonesia). Organisasi ini dibidani oleh Ny. Soenarjo Mangoenpoespito, mantan ketua Fujinkai, sementara anggotanya adalah semua organisasi perempuan lokal dengan tugas pokok mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah membantu Palang Merah Indonesia, menyelenggarakan dapur umum, serta menyantuni prajurit di garis depan (Soedijat, 1995: 284).

Bersamaan dengan pembentukan Perwani, di Jakarta juga dibentuk Wani (Wanita Negara Indonesia). Organisasi ini dipimpin oleh perempuan-perempuan terkemuka dalam gerakan perempuan seperti Soewarni Pringgodigdo, Sri Mangoensarkoro, Soejatin Kartowijono, dan Soesilowati. Adapun tujuannya adalah menyelenggarakan dapur umum, mendistribusikan beras untuk perjuangan, serta menyusun tenaga perempuan untuk kemerdekaan Indonesia secara cepat dan seluas-luasnya. Sri Mangoensarkoro dalam buku memoarnya mendeskripsikan bahwa usaha tersebut mencakup dua hal. *Pertama*, terlibat dalam usaha perjuangan atau pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan Indonesia Merdeka yang telah direbut dari Jepang. *Kedua*, memasukkan tokoh-tokoh perempuan untuk duduk dalam Komite Nasional Pusat, atau badan perwakilan rakyat (Mangunsarkoro 1946: 18).

Selain Perwani dan Wani, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan juga bermunculan organisasi-organisasi perempuan baru. Beberapa di antaranya menurut Suryochondro (1984) adalah Gerpi (Gerakan Poetri Indonesia, Tanjung Karang), Persatoean Pegawai Poetri Indonesia (Yogyakarta), GPPI (Gerakan Pemoeda Islam Indonesia), Moeslimat Masjoemi, serta PPI (Persatoean Pemoeda Poetri, Yogyakarta). Selain itu, Suryochondro juga menyebut berbagai organisasi kelaskaran perempuan di Bandung, Magelang, Solo, Yogyakarta, Madiun, dan Ujungpandang serta Laskar Muslimat di Tapanuli, Bukittinggi, Padang, Solok, Sawahlunto, serta tempat-tempat lain di Sumatera Tengah. Semua perkembangan tersebut, menjadi penanda dari munculnya identitas baru perempuan Indonesia.

Untuk menyatukan semua organisasi itu serta menegaskan posisi perempuan dalam negara yang baru, Perwani Yogyakarta mengusulkan perlunya sebuah kongres di Yogyakarta. Kongres ini sekaligus diarahkan untuk merealisasikan rencana Kongres Perempuan Indonesia V yang batal diselenggarakan di Semarang karena Perang Dunia II. Perwani daerah di seluruh Indonesia, Wani Jakarta dan sekitarnya, Badan Pusat Taman Siswa, Pimpinan Pusat Aisjiah, serta Perhimpunan Poetri Indonesia adalah organisasi-organisasi yang dirangkul untuk bergabung dalam kongres itu,

dan Gedung Seni Sono, Yogyakarta, ditetapkan sebagai tempat perhelatan.

Namun demikian, rencana itu kandas. Satu bulan sebelum acara, 25 dan 27 November 1945, Yogyakarta dibombardir oleh Tentara Inggris (*Kedaulatan Rakjat* 28-11-1945). Pengeboman kedua terjadi pukul 13.00, tepat tiga jam sebelum Perwani melangsungkan rapat persiapan. Keesokan harinya, Sri Sultan Hamengku Buwana IX mengeluarkan larangan terhadap semua aktivitas kongres, konferensi, dan semacamnya (Soewito 2005: 358) di Yogyakarta, yang kala itu populer sebagai Kota Kongres dengan 1001 urgensi program itu (Anwar 2015: 119). Sehubungan dengan itu, panitia disarankan untuk mengalihkan ajang kongres ke tempat lain. Klaten pun dipilih dengan pertimbangan tidak jauh letaknya dari Yogyakarta dan relatif aman.

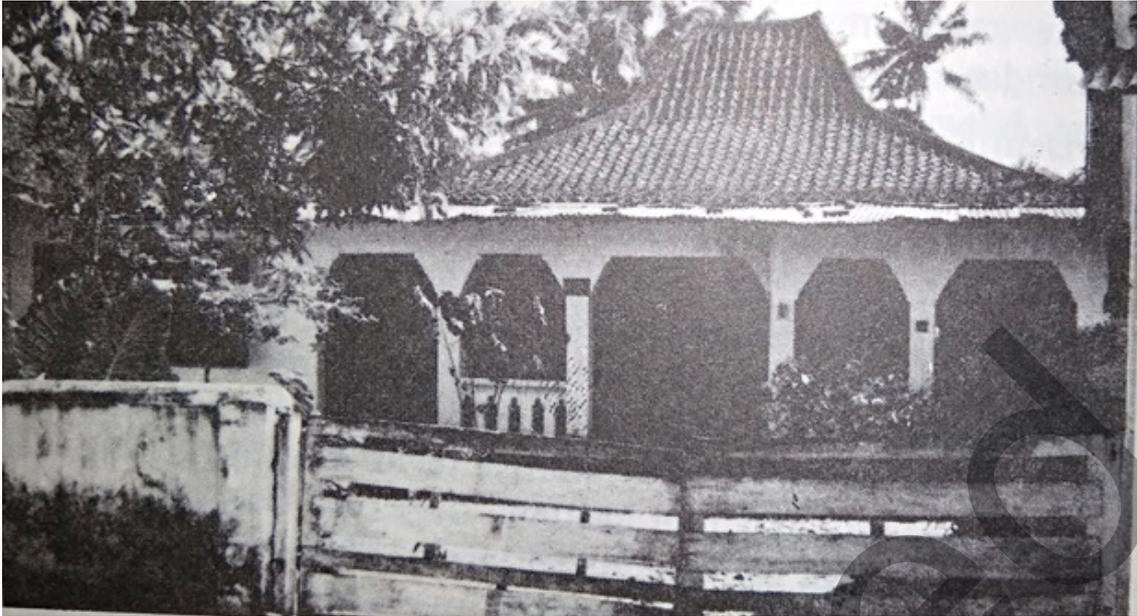
Pemilihan Klaten sebagai tempat perhelatan kongres ditindaklanjuti dengan pengiriman utusan ke sana. Suratmi dan D.M. Hadiprabowo adalah sosok-sosok yang berada di balik usaha keras tersebut.

“Dengan senang hati Bapak Bupati Klaten menerimanya serta menyediakan Gedung Kabupaten sebagai acara kongres. Lain daripada itu, Gusti Joedonegoro menjadi panitia pembantu” (Soedijat 1995: 285).

Pengeboman Yogyakarta membuat banyak perempuan ketakutan dan membatalkan keikutsertaannya dalam kongres. Bahkan, panitia kerja pun hanya tersisa lima orang, yaitu Ny. Soesanto (ketua), S. Iman Soedijat (penulis I), anak-beranak Sri Soedari Imam Panudja (penulis II) dan Din Soerjadingrat (bendahara I), serta Ny. Soekardi (bendahara II). Dengan berani, kelima orang ini nyaris setiap hari pulang pergi Yogyakarta—Klaten. Sultan Hamengku Buwana IX memfasilitasi semua kegiatan mereka dengan menyediakan mobil beserta bensin bahkan sopir (Soewito, 2005: 356). Pembakaran, pertempuran, dentuman senjata api, serta gelegar mortir dan meriam menjadi pengalaman rutin mereka (Soedijat 1995: 286). Setelah susah payah itu, kongres pertama Perwari bisa digelar pada 15-17 Desember 1945. Di setiap stasiun kereta orang-orang berkumpul menyambut para perempuan ini, dan di setiap perempunan mereka meneriakkan pekik merdeka (Stuers 2008: 196).

Antusiasme terhadap kegiatan Perwari juga ditunjukkan oleh Bupati Joedonegoro dengan menanggung akomodasi seluruh peserta. Ia memberikan rumah besar berikut paviliunnya untuk penginapan panitia dan peserta. Soedijat mengenang bahwa para perempuan itu terpaksa membuang undi untuk menentukan lokasi menginap. Caranya, setiap peserta yang datang harus mengambil nomor kemudian dicocokkan dengan nomor yang menempel di setiap pintu kamar. Hal itu dilakukan agar tidak ada kecemburuan terkait perbedaan fasilitas yang mereka peroleh (Soewito 2005: 358).

Penjagaan ketat, penggeledahan, dan penyitaan juga menjadi bagian cerita kongres Perwari. Hal itu terutama dialami oleh perempuan-perempuan



Figur 1. Lokasi Kongres Pertama Perwari (Sumber: Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan '45 Klaten, 1976: 102)

yang berasal dari luar Klaten maupun Yogyakarta. Soejatin Kartowijono mengenang bahwa kereta yang ditumpangnya harus berhenti beberapa kali dan berganti-ganti kereta secara sembunyi-sembunyi bahkan berganti kereta api barang (Kartowijono 1984: 12-13). Sisanya, mereka kebingungan menentukan siapa sosok yang akan memimpin sidang. Mereka dihadapkan pada dilema bahwa kongres tersebut digagas oleh Perwani Yogyakarta, tetapi tidak ada posisi yang jelas tentang pusat dan daerah sehingga mereka tidak bisa secara otomatis menjadi pemimpin. Setelah melalui perdebatan sengit, mereka pun sepakat mengangkat Soejatin Kartowijono sebagai pimpinan rapat. Pemilihan itu setidaknya dilakukan dengan dua pertimbangan. *Pertama*, Soejatin adalah peserta yang paling tua. *Kedua*, ia adalah sosok kunci di balik Kongres Perempuan Pertama 22-25 Desember 1928 (Blackburn, 2007: xxxi).

Tidak hanya merumuskan bentuk organisasi dengan tugas-tugas seperti mengucapkan salam dengan pekik merdeka, mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, serta membantu Komite Nasional Indonesia di daerah-daerah, kongres tersebut juga menjadi media perjumpaan sekaligus ajang bertukar pikiran bagi aktivis-aktivis perempuan di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

“Tokoh-tokoh pergerakan wanita yang telah lama tidak saling bertemu, pada kesempatan itu bisa berkumpul, tidur dalam satu bangsal berjejer seperti ikan pindang. Menyenangkan memang. Pada kongres tersebut, kami bisa berbincang-bincang dengan Ibu Burdah, Ibu Susanto Tirtoprodjo, Ibu Supeni, Ibu Sri

Mangunsarkoro, dan tokoh-tokoh pergerakan wanita lainnya” (Hardi 1985: 40).

Selain itu, kongres juga membantu menumbuhkan identitas baru sebagai perempuan Indonesia, serta menghasilkan beragam keputusan.

Dua peristiwa penting turut menandai hari terakhir kongres itu. Peristiwa pertama adalah perjumpaan intim para perempuan itu dengan Presiden Soekarno di Stasiun Klaten.

“Pada petang hari usai kongres di bawah pimpinan Ibu Sri Mangoensarkoro kita peserta kongres berkumpul di stasiun Klaten, menunggu datangnya Presiden Soekarno dan beberapa pejabat tinggi negara dari Yogyakarta ke Madiun. Begitu KA—kereta api—berhenti di stasiun Klaten turunlah Bung Karno dan pengiringnya ini menerima laporan hasil kongres yang disampaikan oleh ibu Sri Mangoensarkoro. Dengan rasa puas dan bangga Presiden memberikan restunya...Disertai lambaian tangan dan senyum khas Bung Karno dan pengiringnya kita lepaskan mereka....Peserta kongres pun dengan bangga dan penuh semangat pulang ke tempat masing-masing dengan membawa ide baru untuk membela tanah air tercinta” (Soedijat 1995: 287).

Peristiwa penting kedua adalah keputusan Perwani dan Wani untuk berfusi menjadi satu organisasi baru perempuan Indonesia di era kemerdekaan. Keputusan itu memungkinkan bagi keduanya karena keberadaan mereka yang independen, berbeda dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya, seperti Wanita Taman Siswa, Aisjiah, serta Pemoeda Poetri Indonesia yang memiliki organisasi induk. Pada awalnya fusi itu akan diberi nama Persatuan Wanita Indonesia (Perwindo) agar tampak seperti nama partai. Akan tetapi, supaya terdengar feminin, disepakati nama Perwari (Soewito 2005: 359). Selanjutnya, kedua organisasi itu sekaligus bersepakat memilih Sri Mangoensarkoro dan D.M. Hadiprabowo sebagai ketua dan wakilnya sedangkan Yogyakarta menjadi pusat pergerakannya.



Figur 2. Lambang Perwari. Sumber: Kowani 2017

Di Klaten pula, Perwani dan Wani bersepakat bahwa organisasi baru mereka, Perwari, didasarkan pada tiga asas, yaitu ketuhanan, kebangsaan, dan kerakyatan. Adapun tujuan utamanya adalah menuntut dan mempertahankan keadilan sosial demi terwujudnya keselamatan dan perikemanusiaan di dalam masyarakat Indonesia (*Madjallah Wanita Repoeblik Indonesia*, 1946: 9). Selanjutnya, mereka juga memilih trisula yang berbentuk tiga keris berlekuk lima dalam satu lingkaran sebagai simbol organisasi Perwari.

Sri Mangoensarkoro, sang ketua terpilih, dalam rilis media perdana Perwari menjelaskan bahwa trisula melambangkan kebenaran, kesucian, dan keberanian hidup,

sementara lekuk lima dan lingkaran masing-masing melambangkan persatuan selayaknya cerita pewayangan *Pandawa lima* yang memerangi angkara murka demi terciptanya kebulatan kesempurnaan (*Madjallah Wanita Repoebliek Indonesia*, 1946: 6). Simbol ini disempurnakan sepuluh tahun kemudian menjadi simbol yang kita kenal sekarang (*Suara Perwari* 1956: 23; Kowani).

Keberadaan Perwari sebagai hasil fusi Perwani dan Wani sebenarnya bukanlah hal mudah. Sri Mangoensarkoro mencatat bahwa sesungguhnya kedua organisasi tersebut sebenarnya berbeda aliran secara ekstrim. Menurutnya, Wani adalah organisasi perempuan yang memiliki kesadaran kebangsaan perempuan merdeka sementara Perwani tidak lebih dari organisasi perempuan yang mewarisi tradisi Fujinkai dan dipimpin oleh orang-orang baru yang pada zaman Belanda belum pernah memegang kendali pergerakan wanita (Mangoensarkoro, 1946: 18).

Di satu sisi, perbedaan latar belakang antara Wani dan Perwani membuat Perwari tampil sebagai organisasi perempuan dengan paket lengkap. Sri Mangoensarkoro bahkan berpendapat bahwa kehadiran Perwani untuk garis belakang peperangan sangat tepat sekali bagi keperluan pertahanan kemerdekaan di Indonesia. Di lain sisi, perbedaan itu juga membuat Perwari sangat rentan dan terancam tidak solid. Ancaman kerentanan itu semakin terbuka seiring kebijakan Perwari yang membebaskan anggota-anggotanya untuk memasuki organisasi-organisasi politik yang sesuai dengan asas dan tujuan Perwari, sekalipun mereka menyatakan diri sebagai organisasi sosial (Mangoensarkoro 1946: 18-21).

Satu Biduk Dua Nahkoda

Sekalipun didirikan di atas pondasi yang berlainan jenis, sebagai organisasi “baru” bagi perempuan di era kemerdekaan, Perwari mendapat perhatian yang relatif besar. *Kedaulatan Rakjat* (19-12-1945), salah satu media nasional Republik Indonesia, misalnya, memuat besar-besaran berita pembentukan organisasi ini di halaman pertamanya. Tidak hanya itu, surat kabar itu juga menampilkan urgensi program Perwari untuk membela kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah: (1) mendorong pemerintah untuk menggunakan tenaga perempuan dalam upaya bela negara, (2) mendirikan



Figur 3. Sri Mangoensarkoro. Sumber: Mangoensarkoro 1946: i

atau membantu koperasi untuk keperluan dapur umum dan membantu beban kaum ibu dalam rumah tangga, (3) memperluas dapur umum, (4) mengusahakan pakaian, (5) mengadakan tempat pemeliharaan anak supaya ibunya dapat bekerja untuk umum, (6) membantu pengungsian, serta (7) memikirkan dan menjalankan kebersihan umum untuk mencegah penyakit menular yang sedang berjangkit.

Selain itu, kepopuleran Perwari juga terlihat dari ragam kegiatan yang dilakukan anggotanya. Kurang dari seminggu sejak terbentuk, organisasi yang berpusat di Bintaran Kidul No. 28, Yogyakarta (kediaman Pangeran Hadinegoro) ini muncul sebagai sponsor utama peringatan Hari Ibu di Yogyakarta, 22 Desember 1945. Dalam acara tersebut sang ketua bersanding dengan Ki Hadjar Dewantara menyampaikan pidato tentang kaum perempuan dan perjuangan kemerdekaan (*Kedaulatan Rakjat*, 23-12-1945).

Tidak ketinggalan, kepopuleran Perwari juga terlihat dari keterlibatan tokoh-tokoh perempuan terkemuka dan populer di dalamnya, baik sebagai pengurus maupun anggota biasa. Di antaranya adalah Gusti Nurul, kembang pergerakan dari Kraton Mangkunegaran yang menjadi ketua bagian sosial Perwari cabang setempat (*Wanita*, 1950: 229), Maria Ulfah Santosa, Soewarni Pringgodigdo, Moerdjani, S.K. Trimoerti, Mangoen Poespito, Soesilowati, serta Soeprapti. Secara kolektif, para perempuan ini mengusahakan berbagai kebutuhan logistik untuk front Republik Indonesia, mulai dari *nuk* (nasi bungkus), jadah, serundeng, ikan asin, serta aneka makanan kering lainnya. Di samping itu, mereka membentuk badan pekerja yang bertugas mempersiapkan kongres bagi organisasi-organisasi perempuan di Indonesia.

Kebesaran Perwari itu sekaligus menjadi daya pikat organisasi-organisasi perempuan lainnya, yang umumnya merupakan sayap organisasi keagamaan maupun partai politik, untuk menginduk di dalamnya. Salah satunya adalah Nahdlatu Oelama Moeslimat yang berpendapat bahwa Perwari adalah organisasi perempuan independen yang membantu organisasi-organisasi perempuan lainnya dalam memperluas pergaulan (Soewito 2005: 317).

Di bawah pengaruh Sri Mangunsarkoro, perempuan-perempuan kelompok ini melengkapi konsep ibu bangsa menjadi ibu negara. Dalam konteks inilah, revolusi kemerdekaan dianggap sebagai jalan untuk mencapai masyarakat sosialis berdasarkan perikemanusiaan yang bertuhan. Mereka berkeyakinan bahwa menjadi ibu negara adalah mempertahankan hak dan kedudukan perempuan untuk kemanusiaan perempuan, bukan partai politik, sesuai dengan isi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Mangunsarkoro 1946: 28-31).

Dari program-program Perwari serta aktivitasnya selama dua minggu pertama, terlihat jelas bahwa organisasi ini berorientasi pada dua hal. Pertama, partisipasi perempuan dalam usaha bela negara dengan menitikberatkan



Figur 4. Berita pertama Perwari (kiri bawah). Sumber: *Kedaulatan Rakyat*, 19-12-1945

perjuangan di garis belakang pertempuran. Kedua, pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk mendukung upaya bela negara di masa perang. Orientasi tersebut semakin pelik ketika di awal Januari 1946 Perwari memutuskan untuk bergabung dengan Persatoean Perdjoengan.

Persatoean Perdjoengan merupakan organisasi massa yang terbentuk dari hasil kongres 132 organisasi sipil, partai, laskar, dan tentara di Gedung Serbaguna Purwokerto, pada 3-5 Januari 1946. Adapun nama Persatoean Perdjoengan baru digunakan dua minggu kemudian dalam Kongres kedua mereka pada 15-16 Januari 1946 di Gedung Agung Solo. Sekalipun baru sepuluh hari terbentuk, keanggotaan Persatoean Perdjoengan terus bertambah, termasuk Perwari. Bersama dengan 140 organisasi lainnya, Perwari menyepakati dan menuntut tujuh butir minimum program Persatoean Perdjoengan, yaitu: (1) berunding untuk mencapai kemerdekaan 100%, (2) pemerintahan rakyat (dalam arti kesesuaian haluan pemerintah dengan kemauan rakyat), (3) tentara rakyat (dalam arti kesesuaian haluan tentara dengan kemauan rakyat), (4) melucuti senjata Jepang, (5) mengurus tawanan bangsa Eropa, (6) menyita dan memanfaatkan pertanian musuh, serta (7) menyita dan memanfaatkan perindustrian musuh (pabrik, bengkel, tambang, dan lain-lain). Tidak hanya itu, Perwari juga menjadi salah satu

perwakilan dari Persatoean Perdjoengan yang membawa tujuh butir program minimum itu kepada pemerintah, sekalipun kemudian ditolak. Pemerintah berpendapat bahwa tuntutan itu terlalu radikal.

Gagal berunding tidak menyurutkan langkah Persatoean Perdjoengan dan organisasi-organisasi pendukungnya. Gelombang demonstrasi dan tuntutan program lainnya terus disuarakan. Salah satunya pada 17 Februari 1946, Persatoean Perdjoengan melayangkan lima tuntutan, yaitu: (1) isi minimum program Persatoean Perdjoengan, (2) penarikan tentara Inggris-NICA dari Indonesia, (3) lenyapnya pengadilan dan polisi internasional dari Indonesia, (4) kembalinya pemuda dan gadis-gadis yang ditawan Inggris-NICA, serta (5) membatalkan perundingan dengan van Mook sebelum syarat pengakuan Indonesia merdeka tercapai. Tidak ketinggalan, langkah ini juga diikuti dengan larangan bagi anggota Persatoean Perdjoengan untuk duduk dalam pemerintahan kabinet Soetan Sjahrir.

Bagi Perwari, koalisi dengan Persatoean Perdjoengan itu semata-mata merupakan tuntutan zaman. Mereka berpendapat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bagi perempuan hanya bisa dicapai melalui jalur politik dan langkah-langkah konkret, bukan melalui cara-cara diplomasi sebagaimana dilakukan pemerintah.

“Datangnja tentera Inggris sebagai wakil Sekutu meniupkan... tragedie2 revolusi....Gelombang politik jang menderu2... tak urung berpengaruh terhadap organisasi2 wanita...untuk mempertahankan agar dilaksanakannja politik proklamasi agar dibentuk Persatoean ...Adapoen organisasi wanita jang mendjadi anggauta dari Persatoean dikala itu ialah Perwari...satu organisasi wanita terbesar jang lahir ditengah2 revolusi, jang memang selajaknja djika ikut bertanggungjawab terhadap terlaksanaja politik proklamasi dan revolusi itu” (Soeprapti, 1953: 149).

Tidak hanya bergabung dengan Persatoean Perdjoengan, Perwari juga mengajak organisasi-organisasi lainnya untuk mengikuti jejaknya. Ajakan ini disampaikan secara lugas oleh wakil-wakil Perwari dihadapan tiga organisasi lainnya, PPI, Wanita Kristen Indonesia (WKI), serta Partai Katolik Repoeblrik Indonesia (PKRI) bagian wanita dalam Konferensi Wanita Indonesia, pada 25-26 Februari 1946 di Solo—Aisjijah, Moeslimat, dan Istri Sedar juga diundang tetapi tidak hadir. Sekali lagi, dalam pandangan Perwari, diplomasi hanya merugikan saja. Sebab, menurut mereka, peristiwa di Surabaya, Semarang, Magelang, Bandung, dan Jakarta telah membuktikannya. Selain itu, rakyat juga percaya bahwa Belanda mempunyai maksud lain untuk menjajah kembali Indonesia (*Verslag Konperensi Wanita Indonesia*).

Ajakan Perwari supaya (organisasi) perempuan bergabung dengan Persatoean Perdjoengan mendapat bermacam-macam tanggapan. WKI dan PKRI menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap. Sementara PPI, sekalipun para wakilnya tidak hadir

karena diharuskan kembali ke Yogyakarta, menyampaikan bahwa mereka mendukung kemerdekaan Indonesia 100% sebagaimana semboyan Persatoean Perdjoengan. Di lain sisi, perbedaan pendapat tentang Persatoean Perdjoengan juga terjadi di dalam tubuh Perwari. Soewarni Pringgodigdo perwakilan Perwari Jakarta, misalnya, menyatakan setuju selama hal itu tidak merobohkan pemerintah dan di antara mereka saling mengerti juga mempercayai. Sikap ini mendapat tanggapan keras dari Sri Mangoensarkoro. Di hadapan Kongres, perempuan yang dibesarkan dalam tradisi Taman Siswa ini menyatakan dengan tegas bahwa Persatoean Perdjoengan tidak bermaksud menggulingkan pemerintah melainkan melakukan koordinasi dalam perjuangan sehingga perempuan pun harus terlibat.

Keputusan Perwari untuk mempengaruhi organisasi perempuan mengikuti kiprahnya dalam Persatoean Perdjoengan berbuntut panjang. Seusai kongres, anggota-anggota yang tidak setuju dengan kebijakan Sri Mangoensarkoro terus melayangkan protes. *Pertama*, Persatoean Perdjoengan adalah badan politik sedangkan Perwari bukan suatu pergerakan politik. *Kedua*, apakah Perwari juga akan melucuti tentara Jepang serta menyita perkebunan dan perusahaan, seperti yang tertera dalam program jangka pendek Persatoean Perdjoengan? *Ketiga*, Perwari telah melanggar asas dan anggaran dasarnya sendiri (Soeprapti 1953: 149). Selain itu, kekisruhan juga ditunjukkan dari pernyataan Maria Ulfah Santoso satu bulan setelah Kongres di Solo. Menteri Sosial dalam kabinet Sjahrir itu mengatakan bahwa ia telah menarik diri dari Perwari karena berpendapat bahwa organisasi itu telah melanggar anggaran dasarnya. Selain itu, ia juga menegaskan keputusan itu bahkan diambilnya jauh sebelum ia dilantik sebagai menteri (Poeze 2009: 21).

Pernyataan Maria Ulfah tersebut sangat menarik jika disandingkan dengan laporan Kongres di Solo pada 25-26 Februari 1946. Ketidakhadiran Maria Ulfah dalam Kongres tersebut, yang hanya dilaporkan “tidak dapat hadir” tanpa ada keterangan sebagaimana ketidakhadiran pemuka utama lainnya, sepertinya sudah menjadi tanda-tanda bahwa perempuan Hindia Belanda pertama yang menyandang gelar *Master in de rechter* (Mr), sarjana hukum, itu mulai meninggalkan Perwari. Meskipun demikian, keputusan itu tampaknya belum ditunjukkannya secara terang-terangan. Halaman keempat laporan kongres masih menyebutkan bahwa ia masih memberikan daftar nama-nama perempuan yang dipandang benar-benar mewakili gerakan perempuan. Di antaranya perempuan-perempuan dari PPI seperti Ny. Soebandrio, Ny. Soetarman, Ny. S.K. Trimoerti, N. Soesilawati, serta dirinya sendiri. Tidak ketinggalan, ia juga menyusun daftar perempuan progresif dari Perwari antara lain dirinya sendiri, Ny. Gondosoebroto, Ny. Soewarni Pringgodigdo, Ny. Sri Mangoensarkoro, Ny. Moerdjani, M. Moedinem, Ny. Koesbani, Ny. S.K. Trimoerti, N. Sosilawati, serta Ny. Soepardjo (*Verslag Konperensi Wanita Indonesia 1946*).

Keputusan Maria Ulfah diikuti oleh perempuan-perempuan lainnya terutama setelah Persatoean Perdjoengan menggalang aksi pemboikotan terhadap kabinet Sjahrir. Perselisihan, bentrokan, dan perpecahan berlangsung sengit dalam tubuh Perwari. Namun, Sri Mangoensarkoro menyikapinya dengan sangat tenang. Ia menulis bahwa segala gejolak yang terjadi dalam Perwari adalah sebuah dinamika yang wajar. Lebih dari itu, dinamika tersebut dipercayainya justru sebagai dorongan untuk kaum perempuan dalam perjuangan politik yang mengelilinginya, dan kemudian harus mampu menetapkan kakinya dalam susunan negara merdeka.

Sri Mangoensarkoro optimis dengan pendiriannya. Akan tetapi, ancaman-ancaman akan keluar semakin santer disuarakan cabang-cabang Perwari. Tanggal 5 April, misalnya, Perwari Jawa Timur mengancam akan keluar jika Perwari tetap mendukung Persatoean Perdjoengan. Langkah ini diikuti oleh Perwari Priangan sehari kemudian (Poeze, 2019: 21). Lima hari setelahnya, 11 April 1946, Sri Mangoensarkoro mengambil langkah cepat menyatakan pembelaannya untuk meredam protes-protes sekaligus mencegah semakin banyaknya cabang maupun anggota yang keluar. Pembelaan itu dimuat dalam *Madjallah Wanita Repoeblik Indonesia*, media Perwari, edisi perdana. Di sana ia menjawab bahwa keanggotaan Perwari dalam Persatoean Perdjoengan sama sekali tidak melanggar asas dan anggaran dasar. *Pertama*, Pancasila masih menjadi asas utama Perwari untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia 100%. *Kedua*, Perwari berpendapat bahwa ada banyak jalan untuk mewujudkannya, termasuk koalisi dengan Persatoean Perdjoengan.

“Persatoean Perdjoengan adalah soeatoe badan politik.... Diantaranya mengenai 100% Indonesia merdeka dan Perwari adalah pergerakan sosial...sosial dan politik tidak dapat dipisahkan. Doea-doeanja saling mempengaruhi...dan Perwari sebagai satoe pergerakan wanita Jang bertoejoean dan bertjita-tjita tentoenja djoega menghendaki kemerdekaan Indonesia 100%. Oentoek sampai ke arah tjita-tjita terseboet, bolehlah orang memakai alat ataoe djalan apa anggaran dasarnja...salah satoe djalan itoe dari kehakiman Perwari, jalah masoek dalam Persatoean” (1946: 12-13).

Selanjutnya, Sri Mangoensarkoro menyatakan dengan tegas bahwa anggota-anggota yang mempertanyakan dan memprotes kebijakannya tidak lebih dari kumpulan orang-orang bimbang. Sementara protes-protes mereka juga dirasa sangat lemah dan tidak tepat. Pasalnya, menurut Sri Mangoensarkoro, setiap orang, khususnya perempuan, memiliki hak yang sama untuk mengkritisi pemerintah. Selama caranya baik dan tujuannya untuk memperbaiki, tidak ada alasan untuk takut berpolitik seperti berkoalisi dengan Persatoean Perdjoengan yang dilakukan oleh Perwari.

“Karena bagi soeatoe negeri jang berasaskan demokrasi seperti

Indonesia ini, adalah telah menjadi haknya rajat oentoek ikoet tjampoer mengoroos negara, baik laki-laki ataoe peremporan. Djoega hak memberi correctie kepada beleid pemerintah, asalkan semoea itoe berjalan dengan tjara jang sehat dan bermaksoed memperbaiki. Karenanya ta' seharoesnja orang takoet berpolitik" (Mangoensarkoro 1946: 14).

Sekalipun telah berupaya melakukan pembelaan dan memberi kesadaran bahwa politik tidak selalu buruk bagi perempuan, beragam perdebatan tersebut memaksa Perwari melakukan kongres darurat pada 15-17 Mei 1946. Adapun agenda utama kongres tersebut adalah meninjau kembali keadaan Perwari, baik terkait dengan hubungan internal maupun eksternal. Sri Mangoensarkoro menggambarkan bahwa kongres tersebut berlangsung sangat panas. Pertentangan dua aliran yang mengiringi sejarah Perwari semakin menjadi-jadi (Mangoensarkoro 1946: 24) dan berakhir dengan penolakan terhadap kepemimpinan dan kebijakannya (Hardi 1985: 41).

Selain itu, kongres tersebut juga menghasilkan dua keputusan penting lainnya. *Pertama*, pimpinan pusat Perwari dipindahkan dari Yogyakarta ke Malang, Jawa Timur, untuk menjauhkan pengaruh politik dalam organisasi, khususnya afiliasi dengan Persatoean Perdjoengan. *Kedua*, Ny. Soekardjo Wirjopranoto dipilih sebagai ketua baru, sementara arah dan kegiatan Perwari difokuskan pada perbaikan internal. Perpindahan dan pemusatan fokus itu juga dipandang Sri Mangoensarkoro sebagai kemenangan perempuan-perempuan konservatif yang semata-mata hanya melanjutkan tradisi Jepang.

Keputusan penyelamatan Perwari dari pengaruh politik, khususnya Persatoean Perdjoengan, menyulut berbagai masalah. Sri Mangoensarkoro yang berpikiran bahwa perempuan harus turut campur dalam politik untuk memajukan negara yang baru terbentuk akhirnya memutuskan keluar dari Perwari. Langkah ini diikuti oleh anggota-anggota lainnya dari berbagai cabang. Bahkan, wakil Perwari, M.D. Hadiprabowo pun turut dalam kelompok ini. Bersama-sama dengan 3.050 anggota, mereka membentuk organisasi baru demi mewujudkan gagasan ibu negara. Organisasi ini bernama Partai Wanita Rakjat pada 22 September 1946 dan berkedudukan di Notowinatan No. 60, Yogyakarta (Anonim 1958).

Henggangnya tokoh-tokoh sentral Perwari menimbulkan perbincangan ramai. S.K. Trimoerti bahkan menulis tiga artikel berturut-turut dalam surat kabar *Kedaulatan Rakjat* (edisi 29-8-1946, 30-8-1946, dan 2-9-1946). Di sisi lain, artikel itu ditanggapi oleh Sri Mangoensarkoro sebagai hiburan bagi biduk yang telah terpisah dari induknya itu:

"Artikel seri Nj. S.K. Trimoerti jang streng politisch ini menimbulkan tergeraknja djiwa merdeka dari wanita-wanita jang yakin bahwa wanita berhak memperdjoangkan soal

kewanitaannya dengan melaloei djalan apa sadja, djoega djalan politik, karena kewanitaan adalah kenjataan jang koeat, haloes, dan tinggi dan sama-sama sangat diboetoehkan oleh bentoekan Negara, seperti ekonomi dan lain-lain” (Mangoensarkoro 1946: 24).

Sementara itu, Poeze (2009: 362) berpendapat bahwa istri Sarmidi Mangoensarkoro itu cukup emosional dengan keputusan tersebut. Keteguhannya itu mengubah dirinya dari seorang kritikus menjadi murid dari Tan Malaka. Dalam perkembangan selanjutnya, Sri Mangoensarkoro terus menyebarkan ide-ide politik kewanitaan dan membesarkan partai wanita bersama dengan M.D. Hadiprabowo dan S.K. Trimoerti. Belajar dari kegagalannya bersama Perwari, Sri Mangoensarkoro menerapkan disiplin yang keras dengan melarang keanggotaan rangkap bagi para anggotanya. Dengan cara demikian, ia dianggap telah sekaligus mencetak perempuan-perempuan militan untuk perjuangan revolusi.

Adapun keputusan Perwari untuk berkonsentrasi pada perbaikan internal organisasi serta menjauhi dunia politik membuat organisasi ini mengalami kemunduran. Perwari nyaris tidak pernah terdengar lagi kecuali dalam hal pengiriman bahan makanan kering ke front pertempuran. Selanjutnya, popularitas Perwari naik kembali pada tahun 1950-an saat mereka mengajukan rancangan undang-undang perkawinan, taklik nikah yang digunakan di Indonesia hingga saat ini, serta konfrontasi dengan Sukarno terkait poligami yang dilakukan sang kepala negara. Namun, menjelang pemilu 1955 organisasi ini rontok kembali dan sempat bangkit lagi selama beberapa saat, sebelum kembali runtuh karena tergempur badai politik di tahun 1965.

Kesimpulan

Perwari adalah organisasi perempuan pertama setelah Indonesia merdeka, yang mewakili pengejawantahan imajinasi perempuan tentang negara baru. Meskipun jarang disebut dalam catatan sejarah, perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi ini adalah agen utama di balik penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kepada masyarakat pedesaan, dan memberikan contoh bagi transformasi perempuan Indonesia sebagai manusia sekaligus warga negara baru. Tidak ketinggalan, organisasi ini pertama kali meletakkan dasar-dasar gagasan tentang ibu negara.

Perwari hanya membutuhkan waktu dua minggu untuk menjadi organisasi besar dan terkenal. Namun, kemasyurannya itu sekaligus menyimpan gejala karena Perwari sesungguhnya adalah organisasi yang digerakkan oleh dua kelompok perempuan yang berbeda, serupa biduk yang “berlayar” dengan dua nahkoda. Nahkoda pertama adalah kelompok progresif juga radikal yang beranggotakan perempuan-perempuan yang

sudah aktif dalam pergerakan semenjak masa kolonial Belanda. Mereka menginterpretasikan kemerdekaan sebagai titik balik kesetaraan perempuan, yang hanya bisa diraih jika perempuan di negara baru memiliki kesadaran kebangsaan. Sementara itu, revolusi menurut mereka adalah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kemerdekaan, melalui pertempuran dan politik. Adapun nahkoda kedua adalah sosok-sosok baru dalam dunia pergerakan perempuan, yang membawa semangat mobilisasi rezim sebelumnya (penjajahan Jepang). Semangat mobilisasi itu antara lain tampak dari interpretasi mereka tentang kemerdekaan dan revolusi.

Pada awalnya, perbedaan ideologi dan interpretasi tentang kemerdekaan dan revolusi itu adalah kekuatan terbesar Perwari. Akan tetapi, kegentingan situasi dan langkah-langkah diplomasi yang ditempuh Pemerintahan Sukarno maupun Sjahrir memperuncing perbedaan itu. Terlebih ketika nahkoda utama mereka, Sri Mangoenarkoro, menempuh jalur politik dengan berkoalisi dengan Persatoean Perdjoengan dan turut mengkritisi kebijakan pemerintah. Sekalipun masih independen, koalisi tersebut dipandang sebagai anomali dalam gerakan perempuan dan menimbulkan gejolak internal yang tidak bisa diredam lagi sehingga mereka pun terpecah kurang dari lima bulan sejak terbentuk.

Di satu sisi, keputusan kelompok-kelompok kedua untuk menyelamatkan dan mengembalikan Perwari sesuai muruah gerakan perempuan kala itu tidak bisa disalahkan. Budaya patriarki serta kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di jantung ibu kota (Yogyakarta) yang serba sulit dan buruk tampaknya memaksa mereka untuk berpikir realistis dan mengutamakan hal-hal tersebut, alih-alih mengambil sikap frontal dan radikal sebagai kelompok progresif yang dipimpin ketua dan wakilnya. Belum lagi, tekanan pemerintahan serta penangkapan para pengurus Persatoean Perdjoengan semakin gencar dilakukan oleh Tentara Belanda sehingga “pembersihan” adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Akhirnya, gejolak dalam tubuh Perwari tersebut sekaligus membuktikan bahwa gerakan perempuan pada masa revolusi sejatinya tidak semata-mata terjebak pada politik praktis laki-laki. Perbedaan imajinasi perempuan-perempuan itu tentang hakikat (ke)Indonesia(an), kemerdekaan, revolusi, serta konsep perempuan yang baru (ibu negara) adalah isu-isu penting yang menjadi pergulatan kaum perempuan pada masa kemerdekaan. Semuanya itu, tentu saja membutuhkan kajian kritis untuk memahaminya secara proporsional.

Referensi

Surat Kabar

- Kedaulatan Rakjat*, 19-12-1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 23-12-1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 28-11-1945.
- Kedaulatan Rakjat*, 29-8-1946.

Kedaulatan Rakjat, 30-8-1946.

Kedaulatan Rakjat, 2-9-1946.

Madjallah Wanita Repoeblik Indonesia, 01-05-1946.

Verslag Konperensi Wanita Indonesia 25-26 Februari 1946.

Buku dan Karya Ilmiah

Ai Rospirawati (2013). Peranan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) Pada Masa Revolusi Fisik di Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Airlangga.

Ainur Rohmah (2015). Dinamika Perwari Diy Tahun 1946-1998. *Skripsi*. Universitas Airlangga.

Anonim (1958). *Buku Peringatan 30 Tahun Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*.

Bambang Purwanto (2006). *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?! Yogyakarta*: Ombak.

Blackburn, Susan (ed.) (2007). *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV Jakarta.

D. Triwibowo (2006). 'Gerakan Perempuan di Indonesia,' *Basis* No 01-02, Tahun ke-55, Januari-Februari 2006.

Department of Information Republic of Indonesia (1968). *The Indonesian Women's Movement A Chronological Survey of the Women's Movement in Indonesia*. Jakarta: Department of Information Republic of Indonesia.

Devi Fatmawati (2019). Peranan Sujatin Kartowijono dalam Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) Tahun 1945-1960. *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dobbin, Christine (1979). "The Search of Women in Indonesia History," dalam Alisa Thomson Zainuddin (Ed.), "Kartini Centenary Indonesian Women Then and Now," *Annual Indonesian Lecture Series* No. 12.

Galuh Ambar Sasi (2010). Gerakan Perempuan Indonesia dalam Konstelasi Politik 1950-an: Studi Perwari. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Galuh Ambar Sasi (2015). "Gelora Api (Ke)Merdeka(An) Di Jawa Tengah", dalam Jajat Burhanuddin dan Amurwani Dwi Lestariningsih (Eds.), *Sejarah Berita Proklamasi Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Galuh Ambar Sasi (2017). "Di Tanah Kiblik: Perempuan Dalam Ge(Mer)Lap Revolusi", dalam Sri Margana (Ed.), *Gelora Di Tanah Raja: Yogyakarta pada Masa Revolusi 1945-1949*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada.

H.N. Hadi Soewito (1992). *Lahirnya Kelasykaran Wanita dalam Wirawati Catur Panca*. Jakarta: Yayasan Wirawati Catur Panca.

H.N. Hadi Soewito (ed). 2005. *Wanita Pejuang*. Jakarta: Paguyuban Wanita Pejuang.

I.N. Soeprati (1953). "Selayang Pandang Gerakan Wanita Indonesia," *Madjallah Doenia Wanita*, 1953.

Kowani (2019). "Perwari." Diakses 19 Juni 2020 (<https://kowani.or.id/perwari>).

Kuntowijoyo (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Pustaka.

Lasmidjah Hardi (1985). *Sumbangsihku Bagi Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran Jilid V*. Jakarta: Sinar Harapan.

Magdalena Nimat (2009). Gerakan Perempuan di Indonesia 1950-1965: Studi Kasus Gerwani. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.

- Muhajir Darwin (2004). "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa Ke Masa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 7. No. 3. Maret 2004.
- Nani Soewondo & N. Surasno (1995). *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Timun Mas.
- Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan '45 Klaten (1976). *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Klaten*. Klaten: Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan '45 Klaten.
- Poeze, Harry A. (2009). *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 2: Maret 1946-Maret 1947*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Rosihan Anwar (2015). *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia Jilid 7: Kisah-kisah Zaman Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Kompas.
- S.K. Trimurti (1995). "Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia." *Stensilan*. Koleksi Perpustakaan Soejatin.
- Siti Fatimah (2008). "Perspektif Gender dalam Historiografi Indonesia: Pentingnya Penulisan Sejarah Androginis," dalam Djoko Marihandono (Ed.), *Titik Balik Historiografi Indonesia*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra bekerjasama dengan Departemen Sejarah UI.
- Soejatin Kartowijono (1984). "Kebangkitan gerakan Perempuan Indonesia." *Stensilan*. Koleksi Perpustakaan Soejatin.
- Soeratmi Iman Soedijat (1995). *50 Tahun Republik Indonesia di Yogyakarta: Sebuah Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Panitia Gabungan Pemerintahan HUT Ke-50 Kemerdekaan RI Bhakti Pertiwi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sri Mangoensarkoro (1946). *Pergerakan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Wanita Rakjat.
- Stuers, Cora Vreede de (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sukarno (1984). *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Jakarta: Idayu Press.
- Sukanti Suryochondro (1984). *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawa
- Taylor, Jean Gelman (1995). "Image of Indonesia Revolution," dalam Jane Drakard dan John Legge, "Indonesian Independence Fifty Years on 1945-1995," *Annual Indonesia Lecture Series* No. 20.
- Wieringa, Saskia (1998). *Kuntulanak Wangi: Organisasi-Organisasi Perempuan Indonesia Sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan.